

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998 – 2008 Menggunakan Program Minitab 14

Siti Nurul Afiah

Dosen STMIK Asia Malang

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Sehubungan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia pada khususnya kota Malang, inflasi berdampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara tidak langsung melalui besarnya harga-harga barang di masyarakat. penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laju inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama kurun waktu 1998 – 2008. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota Malang yaitu sebesar 66.5% sedangkan satu variabel bebas lainnya yaitu laju inflasi berpengaruh tidak signifikan hal ini dikarenakan adanya laju inflasi berpengaruh tidak secara langsung.

Kata kunci: PAD (Pendapatan Asli Daerah), Inflasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

ABSTRACT

Economic problems that hit Indonesia and the trust can provide positive and negative impacts of efforts to improve the welfare of the people of Indonesia. Due to the economic crisis and experienced trust has paved the way for the emergence of a total reform in all aspects of life of the nation of Indonesia. One element of reform is the requirement of granting total autonomy to the regions and city districts. In connection with the inflation that occurred in Indonesia in particular the city of Malang, the inflation impact on Gross Regional Domestic Product indirectly through the amount of the prices of goods in society. This study focused on how the influence of local revenue and the rate of inflation to the Gross Regional Domestic Product during the period 1998 to 2008. Revenue have a significant effect on the city's Gross Regional Domestic Product is equal to 66.5% of Malang, while the other independent variables are not significantly affect the rate of inflation this is due to the inflation rate does not directly influence.

Keywords: local revenue, inflation, Gross Regional Domestic Product

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Karena krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota.

Untuk menghadapi era baru yang penuh dengan tantangan yang baru, dibutuhkan strategi yang baru pula. Berbagai ketentuan MPR yang telah dihasilkan melalui Sidang Istimewa yang lalu merupakan strategi kita untuk keluar dari krisis dan kepercayaan serta menghadapi era globalisasi.

Salah satu ketentuan MPR tersebut adalah TAP MPR Nomor XV/MPR/1998. TAP MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan segera membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Kedua UU ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Kemudian kedua UU tersebut direvisi lagi dengan UU No. 32 dan No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan UU tersebut adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik,

lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia pada khususnya kota Malang, inflasi berdampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto secara tidak langsung melalui besarnya harga-harga barang di masyarakat.

Dengan adanya uraian di atas maka penelitian ini difokuskan terhadap bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan laju inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama kurun waktu 1998 – 2008.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bahwa pada prinsipnya pendapatan daerah dapat dikelompokkan menjadi:

- Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Pinjaman daerah, dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Suparmoko (2002: 55) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: pajak, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Inflasi

a. Pengertian dan Teori Inflasi

Situs Pribadi Peminat pembangunan menjelaskan bahwa pengertian inflasi yang disampaikan para ahli dapat diuraikan sebagai berikut:

Inflasi menurut A.P. Lehner: inflasi adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*Excess Demand*) terhadap barang-barang dalam perekonomian secara keseluruhan. Ahli yang lain yaitu Ackley memberi pengertian inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum (bukan satu macam barang saja dan sesaat).
<http://peminatniesppembangunan.blogspot.com/>

Sedangkan menurut Boediono, inflasi sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang lain.

Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai [mata uang](#) secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan [uang](#) yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Walaupun analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi terhadap inflasi sejak tahun 1970-an dapat dibedakan menjadi dua kelompok aliran, yakni *Keynesian* dan *Monetarist* namun dalam beberapa literatur disebutkan versi yang berbeda, dimana aliran inflasi dibagi menjadi, Klasik, Keynesian, Moneterisme, dan Ekspektasi.

Teori Inflasi Klasik

Teori ini berpendapat bahwa tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang beredar, yang dapat dijelaskan melalui hubungan antara nilai uang dengan jumlah uang, serta nilai uang dan harga. Bila jumlah uang bertambah lebih cepat dari pertambahan barang maka nilai uang akan merosot dan ini sama dengan kenaikan harga. Jadi menurut Klasik, inflasi berarti terlalu banyak uang beredar atau terlalu banyak kredit dibandingkan dengan volume transaksi, maka obatnya adalah membatasi jumlah uang beredar dan kredit. Pendapat Klasik tersebut lebih jauh dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar, kredit})$$

Teori Inflasi Keynes

Teori ini mengasumsikan bahwa perekonomian sudah berada pada tingkat *full employment*. Menurut Keynes kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total, karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Jika uang beredar bertambah maka harga akan naik. Kenaikan harga ini akan menyebabkan bertambahnya permintaan uang untuk transaksi, dengan demikian akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan mencegah pertambahan permintaan untuk investasi dan akan melunakkan tekanan inflasi.

Analisa Keynes mengenai inflasi permintaan dirumuskan berdasarkan konsep *inflationary gap*. Menurut Keynes, inflasi permintaan yang benar-benar penting adalah yang ditimbulkan oleh pengeluaran pemerintah, terutama yang berkaitan dengan peperangan, program investasi yang besar-besaran dalam kapital sosial. Dengan

demikian pemikiran Keynes tentang inflasi dapat dirumuskan menjadi :

$$\text{Inflasi} = f(\text{jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi})$$

Teori Inflasi Moneterisme

Teori ini berpendapat bahwa, inflasi disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dan fiskal yang ekspansif, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat sangat berlebihan. Kelebihan uang beredar di masyarakat akan menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan barang dan jasa di sektor riil. Menurut golongan moneteris, inflasi dapat diturunkan dengan cara menahan dan menghilangkan kelebihan permintaan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat kontraktif, atau melalui kontrol terhadap peningkatan upah serta penghapusan terhadap subsidi atas nilai tukar valuta asing. Sehingga teori inflasi menurut Moneterisme dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$\text{Inflasi} = f(\text{kebijakan moneter ekspansif, kebijakan fiskal ekspansif})$$

Teori Ekspektasi

Menurut Dornbusch, bahwa pelaku ekonomi membentuk ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. Ekspektasi rasional adalah ramalan optimal mengenai masa depan dengan menggunakan semua informasi yang ada. Pengertian rasional adalah suatu tindakan yang logik untuk mencapai tujuan berdasarkan informasi yang ada. Artinya secara sederhana teori ekspektasi dapat dinotasikan menjadi :

$$\text{Inflasi} = f(\text{ekspektasi adaptif, ekspektasi rasional})$$

Jenis Inflasi

a. Menurut Penyebab Awal Inflasi

1) Demand-Pull Inflation

Yaitu Inflasi yang disebabkan karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat (sering disebut dengan inflasi murni).

2) Cost-Push Inflation

Cost push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

3) Inflasi Permintaan dan Penawaran

Inflasi ini disebabkan kenaikan permintaan di satu sisi dan penawaran di sisi lain. Timbulnya inflasi karena antara pelaku permintaan dan penawaran yang tidak seimbang artinya jika permintaan barang bertambah sementara penyediaan barang mengalami kekurangan.

b. Berdasarkan Asal Inflasi

1) *Domestik Inflation* atau inflasi yang berasal dari dalam negeri.

Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus menerus di atas dengan mencetak uang. Hal ini menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi transaksinya dan ini menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan harga barang meningkat.

2) *Imported Inflation* atau inflasi yang tertular dari luar negeri.

Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti teh dan kopi di luar negeri (negara tujuan ekspor), harganya mengalami kenaikan dan ini membawa pengaruh terhadap harga di dalam negeri.

3) Menurut Tingkat Keparahan Atau Laju Inflasi, Meliputi:

- Inflasi ringan (<10%)
- Sedang (10% – 30%)
- Berat (30% – 100%)
- Hiperinflasi (>100%)

Pengukuran Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- Indeks Biaya Hidup atau *Cost-Of-Living Index* (COLI).
- Indeks Harga Produsen (IHP) adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- Indeks Harga Komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.

5. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

Kebijakan yang Dapat di Ambil untuk Menghadapi Inflasi

Inflasi tentunya harus diatasi dan untuk mengatasinya dapat dilakukan pemerintah dan otoritas moneter dengan cara melakukan beberapa kebijakan yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter. Adapun penjelasan kebijakan tersebut akan diuraikan di bawah ini.

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Untuk menjalankan kebijakan ini Bank Indonesia menjalankan beberapa politik/kebijakan yaitu politik diskonto, politik pasar terbuka dan menaikkan *cash ratio*.

- a. Politik Diskonto ditujukan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
- b. Politik Pasar Terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal. Dengan cara ini diharapkan masyarakat membeli surat berharga tersebut seperti SBI yang memiliki tingkat bunga tinggi, dan ini merupakan upaya agar uang yang beredar di masyarakat mengalami penurunan jumlahnya.
- c. *Cash Ratio* artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang
2. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Bentuk kebijakan ini antara lain:
 - a. Pengurangan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan
 - b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

Kebijakan Non-Moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah dan pengawasan harga dan distribusi barang.

- a. Menaikan hasil produksi, cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.
- b. Kebijakan upah, tidak lain merupakan upaya menstabilkan upah/gaji, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikkan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.
- c. Pengawasan harga dan distribusi barang dimaksudkan agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun (BPS 2005: 4).

Tarigan (2003:18) membagi berbagai konsep yang bisa dipakai dalam membicarakan pendapatan regional sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional bruto (PDRB) atas harga pasar.
Merupakan jumlah nilai tambah bruto (nilai produksi seperti pendapatan, penyusutan dan pajak tak langsung dikurangi dengan biaya antara) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu.
- b. Produk domestik regional neto (PDRN) atas dasar harga pasar
Merupakan produk domestik regional bruto atas dasar harga pasar dikurangi penyusutan (nilai susut dari barang-barang modal seperti mesin, peralatan, kendaraan dan lainnya).
- c. Produk domestik regional neto (PDRN) atas dasar biaya faktor
Merupakan PDRN atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung neto
- d. Pendapatan regional neto
Pendapatan regional neto merupakan produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor (pendapatan) dikurangi aliran dana yang mengalir keluar ditambah aliran dana yang mengalir masuk.
- e. Pendapatan perorangan (*personal income*) dan pendapatan siap dibelanjakan (*disposable income*)
Pendapatan perorangan dapat di artikan apabila pendapatan regional dikurangi pajak pendapatan perusahaan, keuntungan yang tidak dibagikan, iuran kesejahteraan sosial, ditambah transfer yang diterima oleh rumah

tangga pemerintah bunga neto atas utang pemerintah. Sedangkan pendapatan siap dibelanjakan dapat diartikan apabila pendapatan perorangan, pajak rumah tangga/ PBB, dan transfer yang dibayarkan oleh rumah tangga.

- f. Pendapatan regional atas dasar harga berlaku dan harga konstan

Pendapatan regional atas dasar harga yang berlaku merupakan pendapatan regional yang di dalamnya masih ada unsur inflasinya (menurunnya nilai beli uang). Sedangkan pendapatan regional atas dasar harga konstan adalah pendapatan regional dengan faktor inflasi (menurunnya nilai beli uang) yang sudah ditiadakan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis Regresi

Teknik yang digunakan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan laju inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota Malang selama kurun waktu 1998 – 2008 yaitu dengan analisis regresi linear berganda. Perhitungan persamaan regresi berganda ditunjukkan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana: Y = Produk Domestik Regional Bruto

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = PAD

X_2 = Laju Inflasi

a. Uji Hipotesis (Uji t)

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas (X) mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat (Y) digunakan uji t dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} (Suprpto, 1995:148), dengan rumus:

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Dimana: t = Besarnya

B = Koefisien regresi

S_b = Standar Deviasi

HIPOTESIS PENELITIAN

- a. Bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima: berarti ada pengaruh yang nyata antara PAD dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

- b. Bila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berarti PAD dan laju inflasi tidak mempunyai pengaruh yang nyata

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kriteria Pengujian:

Taraf kesalahan $\alpha = 0.05$

Hipotesis Statistik:

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Laju inflasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) pada taraf $\alpha = 0.05$.

$H_1 : b_1 \neq b_2 \neq 0$, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Laju inflasi (X_2) berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Y) pada taraf $\alpha = 0.05$.

PEMBAHASAN

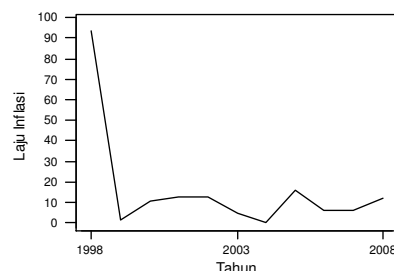
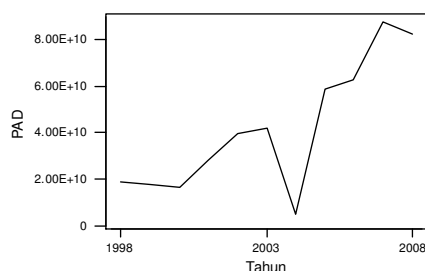
Pendapatan Asli Daerah

Data PAD kota Malang yang terjadi tahun 1998 sampai 2008 yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Data PAD kota Malang Tahun 1998 sampai 2008

Tahun	PAD	Perkembangan(%)
1998	19.226.290.000	
1999	17.580.349.000	-8,56
2000	16.542.143.000	-5,91
2001	27.987.060.000	69,19
2002	39.733.297.000	41,97
2003	42.094.975.000	5,94
2004	50.007.305.103,79	18,79
2005	58.740.205.287,71	17,46
2006	62.311.313.501,19	6,08
2007	87.115.734.710,46	39,81
2008	82.213.442.771,93	-5,63

Dari Tabel di atas didapat pula grafiknya sebagai berikut:



Dari tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa PAD kota Malang dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi pada tahun 1999, 2000 dan 2008 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penurunan di beberapa sektor pos penerimaan PAD.

Sedangkan perkembangan yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 69,19 % hal ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi maupun pajak sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Laju Inflasi

Data Laju inflasi berikut dalam satuan persen. Berikut adalah deskripsi laju inflasi kota Malang selama tahun 1998 sampai 2008, yaitu:

Tabel 2. Data Laju Inflasi kota Malang Tahun 1998 sampai 2008

Tahun	Laju Inflasi(%)
1998	93,16
1999	1,49
2000	10,62
2001	12,45
2002	12,55
2003	5,06
2004	0,47
2005	15,74
2006	5,92
2007	5,93
2008	11,8

Dari tabel di atas didapat grafiknya sebagai berikut:

Dari grafik diatas diketahui bahwa perubahan laju inflasi dari tahun 1998-2008 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 1998 menunjukkan tingkat tertinggi sebesar 93,16 %. Tingginya laju inflasi pada tahun 1998 dikarenakan adanya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, hal ini berakibat pada perekonomian dan menyebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar.

Sedangkan tahun 2004 laju inflasi terendah yaitu sebesar 0,47% hal ini merupakan indikator adanya perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang mulai melaksanakan demokratis yang sesungguhnya serta membaiknya perekonomian Indonesia meskipun hanya berlangsung sangat singkat karena pada tahun 2000 laju inflasi meningkat sebesar 10,62 % diikuti tahun 2001 terjadi peningkatan sebesar 12,45 % dan tahun 2003 laju inflasi mengalami penurunan sebesar 5,06 % diikuti tahun 2004 sebesar 0.47 % selanjutnya mengalami kenaikan lagi sebesar 15,74 pada tahun 2005. dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2006-2007. namun pada tahun 2008 naik lagi menjadi 11,8 %. Produk Domestik Regional Bruto

PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya dalam satu tahun(BPS 2005:4)

Dalam penyusunan PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi yang berasal dari berbagai sumber kegiatan, dalam hal ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan akumulasi kekayaan.

Data PDRB yang diperoleh peneliti berasal dari jumlah produksi sektor ekonomi yang ada di kota Malang yang etrsedia di BPS kota Malang. Sektor-sektor ekonomi di Kota Malang adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

1. Pertanian, Perkebunan, peternakan, kehutan-an, dan perikanan.
2. Pertambangan dan penggalian,
3. Industri pengolahan,

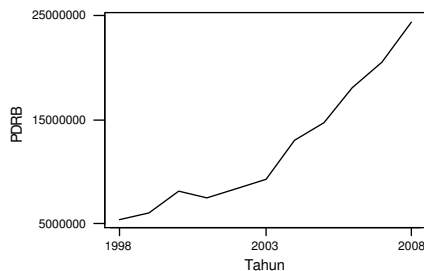
4. Listrik, gas dan air bersih,
5. Bangunan,
6. Perdagangan, hotel dan restoran,
7. Pengangkutan dan Transportasi,
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan,
9. Jasa-jasa.

Dari Sembilan sektor tersebut dijumlah secara keseluruhan sehingga didapatkan angka PD-RB. Data perkembangan PDRB dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Data PDRB Kota Malang Tahun 1998-2008
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB (Dalam jutaan Rupiah)	Perkembangan (%)
1998	5.504.818,21	
1999	6.048.012,92	9,87
2000	8.178.908,20	35,23
2001	7.547.676,02	-7,78
2002	8.353.985,14	10,68
2003	9.311.091,86	11,46
2004	13.040.383,96	40,05
2005	14.732.636,71	12,98
2006	18.092.166,48	22,80
2007	20.543.001,92	13,55
2008	24.392.090,72	18,74

Dari Tabel tersebut didapat grafiknya sebagai berikut:



Dari data diatas dapat dikatakan bahwa PDRB kota Malang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tetapi hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2001 yakni mengalami penurunan sebesar 7,78 %. Ini berbeda dengan penerimaan PAD karena pada tahun 2001 ini PAD justru naik. Persentase kenaikan terbesar terjadi

pada tahun 2004 yaitu sebesar 40,05 % dengan nilai keseluruhan PDRB pada tahun tersebut sebesar Rp 13.040.383,96 juta. Kenaikan ini bahkan melebihi tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan persentase perkembangan yang paling rendah terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 9,87 % dengan nilai total jumlah PDRB sebesar Rp. 6.048.012,92 juta. Dan perkembangan pada tahun ini hanya berbeda tipis dengan perkembangan tahun 2002 yaitu sebesar 10,68 %.

Perkembangan PDRB yang terjadi di kota Malang ini menandakan terjadinya penambahan investasi untuk usaha. Dengan adanya penambahan investasi maka akan menumbuhkan kegiatan ekonomi, pertumbuhan kegiatan ekonomi akan mengakibatkan penambahan produk yang dihasilkan. Disamping adanya penambahan investasi, inflasi juga akan mempengaruhi jumlah PDRB yang ada pada tabel, karena data yang ada merupakan perhitungan pada tahun tersebut bukan berdasarkan tahun dasar.

HASIL ANALISIS DATA

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan laju inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto tahun 1998 – 2008 digunakan analisis regresi berganda dimana analisis ini menggunakan bantuan program MINITAB 14 yang hasilnya ditunjukkan oleh tabel berikut:

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Regression Analysis: PDRB versus PAD, Laju Inflasi

The regression equation is
PDRB = 5307004 + 0.000185 PAD - 41418 Laju Inflasi

Predictor	Coef	SE Coef
T	P	VIF
Constant	5307004	2339307
	2.27	0.053
PAD	0.00018453	0.00004285
	4.31	0.003
Laju Inf	-41418	45527
	-0.91	0.390
		1.0

S = 3675661 R-Sq = 73.2%

R-Sq(adj) = 66.5%

PRESS = 5.527602E+14

R-Sq(pred) = 0.00%

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka persamaan regresi linear berganda dapat diketahui sebagai berikut:

$$Y = 5307004 + 0.000185 X_1 - 41418 X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar Rp5307004 yaitu besarnya PDRB tanpa dipengaruhi oleh PAD dan laju inflasi adalah sebesar Rp. 5307004
- 2) Koefisien regresi PAD sebesar 0.000185 menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang positif atau searah dengan PDRB, artinya semakin tinggi PAD maka PDRB juga naik begitu juga sebaliknya. Bila PAD naik sebesar Rp. 1,- maka PDRB akan naik sebesar Rp. 0.000185
- 3) Koefisien regresi laju inflasi sebesar - 41418. Artinya bahwa variabel laju inflasi memiliki pengaruh yang berlawanan dengan PDRB, artinya semakin tinggi laju inflasi maka PDRB akan semakin menurun. Bila laju inflasi naik sebesar 1 persen maka PDRB akan turun sebesar Rp. 41418.
- 4) Angka adjusted R Square adalah 66.5% Berarti PDRB kota Malang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah dan laju inflasi sebesar 66.5% sedangkan sisanya 33.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, yaitu misalnya seperti suku bunga dan jumlah tenaga kerja.

b. Uji t

Dari hasil perhitungan program MINITAB 14 yang ditunjukkan pada Tabel 4 di atas maka pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh PAD terhadap PDRB kota Malang Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh $t_{hitung} = 4.31$ ternyata lebih besar dari $t_{tabel} = 1.812$. berarti berarti ada pengaruh yang signifikan antara PAD dan Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 2) Pengaruh Laju Inflasi terhadap PDRB kota Malang Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh $t_{hitung} = -0.91$ ternyata lebih kecil dari $t_{tabel} = 1.812$. berarti berarti pengaruh antara Laju Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak terlalu signifikan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto kota Malang yaitu sebesar 66.5% sedangkan satu variabel bebas lainnya yaitu laju inflasi berpengaruh tidak signifikan hal ini dikarenakan adanya laju inflasi berpengaruh tidak secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, 1998, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
2. Badan Pusat Statistik, 1999, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
3. Badan Pusat Statistik, 2000, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
4. Badan Pusat Statistik, 2002, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
5. Badan Pusat Statistik, 2004, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
6. Badan Pusat Statistik, 2005, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
7. Badan Pusat Statistik, 2007, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
8. Badan Pusat Statistik, 2008, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
9. Badan Pusat Statistik, 2009, *Kota Malang dalam Angka*. Penerbit BPS Malang.
10. Halim, Abdul., 2004, *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah.*: (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
11. Hasan, Iqbal., 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta
12. Iriawan, Nur., 2006, *Mengolah Data Statistik dengan Mudah menggunakan Minitab 14.*, Andi, Yogyakarta.
13. Mardiasmo., 2002, *Perpajakan: Edisi Revisi Tahun 2002.*, Andi Yogyakarta.
14. Sudjana., 2001, *Teknik analisis Regresi dan Korelasi Bagi Para Peneliti.* Bandung: PT Tarsito, Bandung
15. Suparmoko., 2001, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah.*, Andi Yogyakarta